

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA USAHA MIKRO MELALUI
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN**

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Untuk memenuhi Persyaratan menempuh Karya Ilmiah I



Oleh :

CRISTINA RETNO LARASATI

NIM : 21106620010

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2024

HALAMAN JUDUL

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia Usaha Mikro Melalui Pelatihan dan Pendampingan

Kewirausahaan

Praktik Kerja Lapangan

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Menyusun Karya Ilmiah I

Oleh:

Cristina Retno Larasati

NIM: 21106620010

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul:

PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA USAHA MICRO MELALUI
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

OLEH:

NAMA : CRISTINA RETNO LARASATI

NIM : 21106620010

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Telah di periksa dan disetujui untuk di uji:

Blitar, 14 Oktober 2024



Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen

BAMBANG SEPTIAWAN.SS.MM.

NIDN. 0724098902

Menyetujui,
Pembimbing

NURUL FARIDA.S.E.MM.

NIDN.0703127061

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA USAHA MIKRO MELALUI
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

OLEH:

NAMA : CRISTINA RETNO LARASATI
NIM 21106620010
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Telah dipertahankan didepankan dosen penguji pada 4 Desember 2024

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Penguji,

Penguji I


Yufi Priyo Sutanto, ST., MM
NIDN.0703047705

Penguji II


Nurul Farida, SE., MM
NIDN.0703127601

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen


Bambang Septiawan, SS., MM.
NIDN.0724098902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi


Suprianto, SE., MM.
NIDN.0717027601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cristina Retno Larasati

Nim : 21106620010

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa PKL yang saya susun dengan judul:

**“PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA USAHA MIKRO MELALUI
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari PKL orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Blitar, 14, Oktober 2024

Pembuat Pernyataan,



CRISTINA RETNO LARASATI
NIM. 21106620010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cristina Retno Larasati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tanggal Lahir : Pasuruan, 07 Juli 2001
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat Rumah : Jl. Sukun No.9D RT.02 RW. 11 Sukorejo Blitar,
Jawa Timur
Alamat Email : Cristinaretno7@gmail.com
Pendidikan Formal : - MINU Sumber Pasir Malang
- MTS Hasyim Asyari Pakis Malang
- SMK Maarif NU 04 Pakis Malang
- Universitas Islam Balitar Blitar – Sekarang
Pendidikan Non Formal : -
Pengalaman Organisasi : -
Penghargaan : -

Blitar, 14 Oktober 2024

Hormat saya



CRISTINA RETNO LARASATI
NIM. 2110662001

Blitar, 10 Oktober 2024

Yth. Nurul Farida, SE., MM

Di

Tempat

PENGAJUAN JUDUL PKL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CRISTINA RETNO LARASATI

N I M : 21106620010

Fakultas : EKONOMI

Progran Studi : MANAJEMEN

Dengan ini saya mengajukan permohonan judul PKL sebagai berikut :

Judul : **“Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Micro melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan”**

Permasalahan : 1. Bagaimana peran dinas koperasi dan UMKM dalam meningkatkan sumber daya manusia ushaa micro melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.?

Demikian atas perhatian dan persetujuan serta bimbingannya lebih lanjut dari Bapak/Ibu, saya ucapakan terima kasih.

Menyetujui,

Pembimbing,



NURUL FARIDA, SE., MM
NIDN.0703127061

Yang Mengajukan



CRISTINA RETNO LARASATI
NIM.21106620010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro melalui Pelatihan dan Pendampingan kewirausahaan.” laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih drajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam praktik kerja lapangan ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Suprianto, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Bambang Septiawan, SE., MM. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Nurul Farida.S,E.MM. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini.

4. Bapak Yufi Priyono Susanto, ST., MM selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan laporan praktik kerja lapangan saya.
5. Mbak Laila, Mas Ongky, Mbak Ayu, dan Mas Bayu yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materi untuk kehidupan penulis.
6. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup “OTW WISUDA” dan teman lainnya yang selalu mendukung apapun kegiatan yang penulis lakukan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan laporan PKL, baik dari Staf Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar maupun teman-teman PKL, semoga kebaikan selalu menghampiri mereka

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini saya teliti selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang saya laksanakan selama 1 bulan (periode 01 Oktober – 1 November 2024).

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kesalahan, dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengharap masukan, kritik, maupun saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 14 Oktober 2024

Penyusun

(Cristina Retno Larasati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	xii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	4
1.4.2 Manfaat bagi Universitas Islam Balitar Blitar	4
1.4.3 Manfaat Bagi Instansi	4
1.4. 5 Manfaat Bagi Pembaca	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Sumber Daya Manusia	6
2.1.1 Definisi Sumber Daya Manusia.....	6
2.1.2 Karakteristik SDM Usaha Mikro	7
2.1.3 Peningkatan Kualitas SDM.....	11
2.2 Peran Pelatihan dan Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas SDM	12

2.2.1 Definisi Pelatihan dan Pendampingan	12
2.2.2 Dampak Pelatihan dan Pendampingan	20
2.3 Tantangan Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro	21
2.3.1 Hambatan SDM Usaha Mikro	21
2.3.2 Solusi Mengatasi Tantangan	22
2.4 Kewirausahaan Sebagai Penggerak Ekonomi Usaha Mikro	23
2.4.1 Konsep Kewirausahaan.....	23
2.4.2 Pentingnya Pendampingan Kewirausahaan	25
2.4.3 Kewirausahaan Sosial	27
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	31
3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan	31
3.2 Metode PKL	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengambilan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Kegiatan	35
4.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar	35
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Blitar	35
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar ...	36
4.2 Pembahasan Kegiatan.....	48
BAB V PENUTUPAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin PKL (Praktik Kerja Lapangan) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar	67
Lampiran 2 Surat Permohonan PKL	68
Lampiran 3 Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar	69
Lampiran 4 Sertifikat Praktik Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar	70
Lampiran 5 Lembar Konsultasi Bimbingan PKL	71
Lampiran 6 Dokumentasi	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menyentuh isu yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi dan social Indonesia saat ini. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam usaha mikro menjadi salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu problem akademik yang muncul dari tema ini adalah bagaimana pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kualitas SDM. Di ranah teori, pelatihan kewirausahaan sering dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha, khususnya dalam aspek manajemen, pemasaran keuangan, dan inovasi. Namun, seacara praktik, sering kali pelatihan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya keterlibatan aktif peserta, kurangnya tindak lanjut pasca pelatihan, atau metode pengajaran yang tidak relevan dengan kebutuhan spesifik usaha mickro. Dalam penelitian in, penting untuk mengupas apakah program tersebut benar-benar menjawab masalah nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, dan sejauh mana pendampingan yang diberikan mampu membantu mereka mengatasi hambatan- hambatan dalam menjalankan usaha mereka.

Dari sisi social usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagian besar pelaku usaha micro berasal dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang memiliki keterbatasan modal, pendidikan, dan akses informasi. Fakta ini mencerminkan realita bahwa banyak

pelaku usaha mikro terjebak dalam pola pengelolaan usaha yang konvensional dan kurang inovatif, sehingga pertumbuhan usaha mereka cenderung stagnan. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, namun tidak jarang program tersebut tidak mencapai hasil yang optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, atau pelaku usaha yang sulit menerapkan materi pelatihan dalam praktik sehari-hari.

Pemilihan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai mitra PKL dalam penelitian ini merupakan langkah yang strategis karena lembaga ini memiliki peran sentral dalam pemberdayaan UMKM di tingkat lokal dan nasional. Dinas ini menjadi aktor penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan. Dengan menjadi bagian dari Dinas Koperasi dan UMKM, mahasiswa dapat mengamati langsung bagaimana pelatihan dan pendampingan dilaksanakan, serta berpartisipasi dalam proses evaluasi program-program tersebut. Mahasiswa dapat belajar bagaimana kebijakan yang dirancang pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan, serta bagaimana program-program itu disesuaikan dengan kondisi lokal.

Selain itu, memilih dinas koperasi dan UMKM sebagai mitra PKL memberikan kesempatan untuk belajar dari tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini dalam memberikan pelatihan kepada usaha mikro yang beragam. Dari keterbatasan sumber daya partisipasi masyarakat yang rendah, hingga kendala dalam pengukuran efektivitas program pengalaman langsung dari lapangan akan

memberikan perspektif yang lebih mendalam bagi mahasiswa mengenai kompleksitas dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia.

Judul ini dipilih karena pentingnya mempelajari bagaimana Dinas Koprasi dan UMKM sebagai actor utama dalam pengembangan sektor ini dapat menciptakan dampak signifikan melalui program yang dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini akan membantu mengeksplorasi seberapa efektif pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh dinas tersebut dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Judul ini juga berkontribusi terhadap kajian kebijakan public yang berfokus pada pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan PKL ini ialah :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang koperasi.
2. Dapat melakukan praktek kerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya yakni bidang pengembangan UMKM.
3. Dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

1.4.2 Manfaat bagi Universitas Islam Balitar Blitar

1. Meningkatkan keterampilan kompetensi dan kemampuan bagi mahasiswa universitas islam balitar yang didapatkan ketika melakukan praktik kerja lapang.
2. Dapat mengetahui relevan atau tidaknya antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata,
3. Sebagai masukan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

1.4.3 Manfaat Bagi Instansi

1. Manjalin hubungan yang harmonis, teratur dan dinamis antara instansi tempat PKL (koperasi) dengan lembaga perguruan tinggi.
2. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat.

3. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

1.4.5 Manfaat Bagi Pembaca

1. Menambah referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir dengan permasalahan yang sama.
2. Mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya program pelatihan dalam pengembangan usaha mikro.
3. Memberikan inspirasi bagi pembaca dalam mengembangan program pemberdayaan yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sumber Daya Manusia

2.1.1 Definisi Sumber Daya Manusia

Makna sumber daya manusia yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi (dalam Rahman, 2020) yang mengemukakan bahwa setidaknya sumber daya manusia memiliki tiga makna.

Makna yang pertama adalah sumber daya manusia merupakan sebuah potensi atau asset yang berfungsi sebagai modal dalam sebuah bisnis atau pengelolaan organisasi, kemudian makna yang kedua adalah sumber daya manusia dipandang sebagai potensi manusiawi yang berfungsi sebagai pengelola atau penggerak jalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dan mewujudkan eksistensinya. Terakhir makna yang ketiga sumber daya manusia dipandang sebagai manusia yang bekerja di sebuah organisasi atau lingkungan, biasanya mereka disebut tenaga kerja, karyawan, pekerja, atau personil.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ensiklopedia Bahasa Indonesia (dalam Rahman, 2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sebuah organisasi, baik perusahaan ataupun sebuah institusi, hal ini terjadi karena sumber daya manusia adalah barometer atau tolak ukur yang menentukan perkembangan sebuah lembaga atau perusahaan

dan merupakan modal serta kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia.

2.1.2 Karakteristik SDM Usaha Mikro

Kinerja UMKM dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya yaitu menciptakan kesempatan kerja. Menurut Sulistyandari et al., (2017) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia, keuangan, teknik produksi atau operasional, pasar dan pemasaran. Faktor eksternal yaitu aspek kebijakan pemerintah, social budaya dan ekonomi, teknik produksi atau operasional dan peranan lembaga terikat. Karakteristik sumber daya manusia dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu :

a. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah proses mengetahui dan memahami apa yang seharusnya dilakukan atau dikerjakan. Pengetahuan dapat juga dikatakan segala sesuatu yang diketahui oleh seorang yang terdapat dalam pikirannya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Knowledge is used effectively and efficiently for the long-term benefit of the organisation (Ode & Ayavoo, 2020). Pendapat ini juga menjelaskan bahwa pengetahuan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh organisasi yang dapat mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Andayani et al., (2021) pengetahuan adalah suatu proses atau cara dimana manusia mengerti, paham, dan mengetahui sesuatu tujuan. Dari

beberapa hasil riset membuktikan bahwa dimensi pengetahuan SDM dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

b. Keterampilan (*Skill*)

Menurut Kandou (2016), keterampilan merupakan kemahiran seseorang untuk melakukan suatu aktifitas atau pekerjaan. Keterampilan (*Skill*) dapat juga diartikan sebagai aktifitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan (Sulistiyandari et al., 2017). Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengukur keterampilan sumber daya manusia tersebut dapat dilihat dari indikator: keterampilan produksi, keterampilan bisnis, keterampilan mengambil keputusan yang tepat, berinovasi dan keterampilan merubah lingkungan bisnis (Sulistiyandari et al., 2017).

c. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan menurut Sidharta & Lusyana (2014) merupakan pemahaman yang berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan. Dan kemampuan merupakan implementasi dari pengetahuan. Menurut Sulistiyandari et al., (2017) kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu dalam mengerjakan

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat kemampuan yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

a. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Salah satu cara mengetahui kemampuan intelektual adalah dengan menggunakan tes IQ. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial dan ingat.

b. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, keterampilan dan karakteristik serupa. Misal, pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan fisik, kekuatan kaki atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik karyawan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Harjadi et al., (2020) yang menjelaskan bahwa karakteristik SDM seperti Ability mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya sejalan dengan itu pula hasil penelitian Kiyabo & Isaga (2020) yang membuktikan bahwa

keunggulan bersaing suatu usaha seperti kemampuan sumber daya pengelola dapat meningkatkan kinerja usaha tersebut, karena Ability dari SDM tersebut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Adapun indikator kemampuan (Ability) menurut Sulistyandari et al., (2017) sebagai berikut :

1. Kemampuan kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
2. Kemampuan memberikan solusi ketika ada perselisihan. Dalam suatu pekerjaan atau usaha maupun perusahaan tentu terjadi perselisihan yang mana terjadi antar karyawan, namun menyikapi hal tersebut dapat memiliki kemampuan memberikan solusi di dalam pokok permasalahan yang terjadi.
3. Kemampuan berkomunikasi. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi. Sehingga komunikasi dengan baik kepada konsumen ataupun pelanggan dapat memberikan informasi yang baik terhadap konsumen.
4. Kemampuan tanggung jawab dalam suatu bisnis. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,

memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat.

5. Kemampuan mengendalikan bisnis dengan baik. Pengendalian bisnis merupakan suatu kontrol atau usaha yang dilakukan seorang manajer perusahaan atau pemilik usaha untuk mengendalikan dan meningkatkan produktifitas perusahaan dari mulai cara kerja, sistem penjualan, maupun sistem lain yang berhubungan dengan perusahaan untuk menghasilkan laba/keuntungan atau manfaat.

2.1.3 Peningkatan Kualitas SDM

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Hal ini juga ditekankan oleh Armstrong, yang menyatakan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi, termasuk UMKM. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kompetensi individu dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam UMKM. Para ahli lainnya, seperti Barney dan Wright, menekankan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam mencapai keunggulan kompetitif dan daya saing yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai pengembangan yang efektif, UMKM memerlukan strategi yang tepat.

Adapun menurut Pasolong (2013:5) mengemukakan bahwa “Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi”. Sedangkan

Menurut Ndraha (2012:12) mengatakan bahwa pengertian kualitas sumber daya manusia, yaitu: Sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generative, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya.

2.2 Peran Pelatihan dan Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas SDM

2.2.1 Definisi Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas (Mangkunegara, 2013).

Dalam konteks koperasi, pelatihan untuk UMKM sering berfokus pada aspek-aspek penting yang dapat membantu usaha kecil berkembang, yaitu :

a. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah kemampuan untuk mengelola arus kas, anggaran, serta pengelolaan aset dan kewajiban yang baik. Dalam pelatihan ini, koperasi biasanya mencakup:

1. **Pencatatan Keuangan (Accounting):** Mengajarkan bagaimana mencatat transaksi keuangan dengan benar, baik pengeluaran maupun pendapatan.
2. **Pengelolaan Arus Kas (Cash Flow Management):** UMKM dilatih untuk memahami pentingnya menjaga

keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran agar tidak terjadi kekurangan dana operasional.

3. **Perencanaan Keuangan (Financial Planning):** Membantu UMKM membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta menetapkan anggaran agar bisnis bisa tumbuh dan berinvestasi dengan bijak.

4. **Mengakses Modal:** Koperasi juga dapat memberikan pelatihan tentang cara mendapatkan akses ke pembiayaan eksternal, baik melalui pinjaman koperasi, bank, atau sumber pendanaan lain seperti investor.

b. Pemasaran Produk

Koperasi sering memberikan pelatihan yang berfokus pada strategi pemasaran untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Pelatihan di bidang pemasaran biasanya mencakup:

1. **Pemasaran Tradisional:** Mengajarkan teknik promosi seperti distribusi pamflet, pemasangan iklan, atau mengikuti pameran untuk memperkenalkan produk ke masyarakat lokal.

2. **Pemasaran Digital (Digital Marketing):** Memberikan pemahaman tentang cara memanfaatkan platform online seperti media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp), e-commerce (Tokopedia, Shopee), dan website untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

3. **Branding:** Pelatihan branding membantu UMKM menciptakan identitas produk yang kuat dan membangun citra merek yang diingat konsumen.

4. **Strategi Penetapan Harga:** Mengajarkan cara menetapkan harga yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan, serta mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga produk.

c. **Pengembangan Produk**

Pengembangan produk adalah proses inovasi atau peningkatan produk yang ada agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam pelatihan pengembangan produk, koperasi biasanya mencakup:

1. **Inovasi Produk:** Membantu UMKM mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang ada agar tetap relevan di pasar. Ini meliputi perubahan desain, fungsi, atau kualitas produk.

2. **Penelitian Pasar (Market Research):** Melatih UMKM untuk melakukan riset pasar sehingga dapat mengetahui preferensi konsumen dan tren terbaru, serta bagaimana produk mereka dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar.

3. **Pengemasan (Packaging):** Menjelaskan pentingnya desain kemasan yang menarik dan fungsional. Kemasan tidak hanya melindungi produk tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk.

4. **Sertifikasi dan Standar Mutu:** Mengajarkan pentingnya mematuhi standar kualitas tertentu atau mendapatkan sertifikasi agar produk dapat diakui secara lebih luas (misalnya, sertifikasi halal, BPOM, atau SNI).

d. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan membuka peluang bisnis baru. Pelatihan pemanfaatan teknologi biasanya meliputi:

1. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** UMKM diajarkan bagaimana menggunakan perangkat lunak manajemen (seperti aplikasi kasir, akuntansi, atau inventaris), dan juga platform komunikasi digital seperti email atau aplikasi chat untuk berinteraksi dengan pelanggan.
2. **E-commerce dan Transaksi Digital:** Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan UMKM dalam memanfaatkan platform perdagangan online (marketplace), sehingga produk mereka dapat diakses oleh konsumen yang lebih luas, bahkan hingga ke luar kota atau luar negeri. Selain itu, pelatihan transaksi digital seperti penggunaan e-wallet, transfer bank online, atau pembayaran melalui QR code juga diberikan.
3. **Otomatisasi Proses Bisnis:** Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang dapat mengotomatisasi beberapa aspek bisnis, seperti pengelolaan inventaris, pemrosesan pesanan, hingga laporan keuangan.

4. **Penggunaan Media Sosial untuk Pemasaran:** Pelatihan ini mencakup cara membuat konten yang menarik di media sosial dan mengelola komunitas online agar lebih dekat dengan pelanggan.

Pendampingan adalah proses bimbingan atau pemberian dukungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan yang relevan kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah tertentu. Berikut adalah beberapa pengertian pendampingan berdasarkan pendapat para ahli:

Menurut Tim Dinkes Jateng (2010): Pendampingan adalah "proses bimbingan yang sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pendamping kepada individu atau kelompok dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensi." Kemudian

Menurut Guy Claxton (2001): Pendampingan adalah "proses interaksi dan keterlibatan yang membantu individu memahami, mengatasi, atau mengembangkan diri mereka sendiri melalui pembelajaran dan pengalaman." Dan Menurut Barbara L. Fredrickson (2000): Pendampingan

adalah "proses pemberian dukungan sosial dan emosional yang dapat

membantu individu mengatasi kesulitan, merasa didukung, dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan." Pendapat para ahli di

atas menunjukkan bahwa pendampingan adalah proses yang

melibatkan bimbingan, dukungan, dan interaksi antara pendamping (yang

lebih berpengalaman) dan individu atau kelompok yang memerlukan bantuan. Tujuan pendampingan adalah membantu mereka dalam mengatasi masalah, mencapai tujuan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan potensi pribadi atau kelompok tersebut. Pendampingan dapat berlangsung dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, atau pekerjaan

Pendampingan UMKM dalam koperasi biasanya bersifat lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing UMKM. Hal ini karena setiap UMKM menghadapi tantangan yang berbeda-beda, baik dalam hal manajemen, pemasaran, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya. Berikut beberapa bentuk pendampingan yang umum dilakukan:

a. Konsultasi Bisnis

Dalam konteks ini, koperasi memberikan akses kepada para ahli atau konsultan yang bisa membantu UMKM mengidentifikasi masalah bisnis, seperti:

1. **Perencanaan bisnis:** Membantu UMKM dalam membuat rencana jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih matang dan terarah.
2. **Analisis SWOT:** Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis agar UMKM dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul.

3. **Solusi manajemen:** Mengatasi masalah-masalah dalam manajemen operasional, seperti pengelolaan sumber daya, pembagian tugas, dan efisiensi kerja.

Konsultasi bisnis membantu UMKM untuk mendapatkan pandangan eksternal yang lebih objektif, sehingga mereka dapat menyusun strategi bisnis yang lebih baik dan siap bersaing di pasar.

b. Bimbingan Praktek Lapang

Pendamping atau konsultan datang ke lokasi usaha untuk memberikan arahan praktis yang lebih kontekstual sesuai dengan situasi bisnis di lapangan. Beberapa bentuk bimbingan praktek lapangan meliputi:

1. **Peningkatan efisiensi produksi:** Pendamping membantu UMKM untuk menemukan cara meningkatkan efisiensi dalam proses produksi atau penyediaan layanan.
2. **Penerapan teknologi:** Memberikan bimbingan langsung tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam operasional UMKM, misalnya penggunaan software untuk manajemen inventaris atau penjualan.
3. **Pengelolaan SDM:** Bimbingan dalam manajemen tenaga kerja agar setiap karyawan bekerja lebih efektif dan sesuai dengan tugas masing-masing.

c. Evaluasi Berkala

Pendampingan juga mencakup evaluasi berkala yang dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan usaha dan

menilai hasil dari bimbingan atau intervensi yang telah diberikan. Beberapa manfaat evaluasi berkala meliputi:

1. **Pemantauan kemajuan:** Evaluasi secara rutin memungkinkan koperasi dan UMKM melihat sejauh mana kemajuan usaha setelah mendapatkan pendampingan.
2. **Penyesuaian strategi:** Jika terdapat kendala atau tantangan baru yang muncul, koperasi dapat membantu UMKM menyesuaikan strategi atau melakukan perubahan rencana untuk lebih efektif mencapai tujuan.
3. **Peningkatan kinerja berkelanjutan:** Dengan evaluasi yang teratur, UMKM bisa terus belajar dari hasil dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu.

d. Pengembangan Jaringan

Pengembangan jaringan adalah bagian penting dari pendampingan, karena koperasi sering kali memiliki akses ke berbagai mitra strategis, pasar yang lebih luas, dan peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Dalam pengembangan jaringan, koperasi biasanya membantu UMKM dalam hal:

1. **Memperluas pasar:** Membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran melalui kerja sama dengan distributor, pengecer, atau melalui platform digital.
2. **Kemitraan strategis:** Menghubungkan UMKM dengan mitra potensial, seperti pemasok, investor, atau lembaga

keuangan, yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bisnis mereka.

3. **Pameran dan promosi produk:** Koperasi juga dapat memfasilitasi UMKM untuk ikut serta dalam pameran dagang, seminar bisnis, atau forum pemasaran, sehingga produk mereka bisa lebih dikenal luas.

2.2.2 Dampak Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan koperasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membawa dampak yang signifikan. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. Dengan pelatihan, mereka mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, serta pengelolaan arus kas yang sehat.

Pendampingan yang bersifat personal dan berkelanjutan juga memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat mengoptimalkan produksi mereka, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki standar kualitas produk.

Pelatihan dalam penggunaan teknologi dan alat digital memungkinkan UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Dengan menggunakan teknologi, seperti aplikasi akuntansi atau manajemen inventaris, proses bisnis menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Dengan pendampingan koperasi, UMKM lebih mudah memperluas jangkauan pasar mereka, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Koperasi juga dapat memfasilitasi keikutsertaan UMKM dalam pameran dagang, atau membantu mempromosikan produk melalui platform digital yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membantu memperkenalkan produk UMKM ke audiens yang lebih besar.

2.3 Tantangan Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro

2.3.1 Hambatan SDM Usaha Mikro

Membangun sebuah usaha yang sukses bukan hal yang mudah bagaikan membalikan telapak tangan. Walaupun sulit para pelaku usaha di Indonesia termasuk banyak yang sukses dalam mengelola bisnisnya dan bisa mempekerjakan banyak pegawai. Berikut Hambatan SDM dalam usaha Mikro sangat bervariasi yaitu : Secara lebih terperinci, Anogara dan Sudantoko (2002:225-6) menggambarkan karakteristik UKM secara umum yang lebih banyak merupakan kelemahan yaitu :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administratif pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kinerjanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.

4. Pengalaman manajerial dan mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta difersifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

2.3.2 Solusi Mengatasi Tantangan

Mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha mikro memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan. Ini bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu, Pelaku usaha mikro dapat didorong untuk mengikuti kursus online, webinar, dan sumber daya digital yang menawarkan materi pembelajaran tentang pemasaran, pengelolaan keuangan, dan strategi bisnis. Dengan teknologi, pelatihan ini dapat diakses kapan saja dan di

mana saja, memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha yang mungkin memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya.

Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemilik usaha mikro harus mendorong budaya belajar di dalam organisasi, di mana karyawan merasa didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi karyawan yang mengikuti pelatihan atau memperkenalkan program mentoring kepada rekan-rekan yang lebih muda.

Penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja SDM dan mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Menggunakan alat penilaian kinerja dan feedback dari pelanggan juga dapat membantu dalam menentukan kekuatan dan kelemahan SDM, sehingga dapat ditangani dengan lebih baik. Selanjutnya, bergabung dalam asosiasi atau komunitas usaha, pelaku usaha dapat berbagi pengalaman, mendapatkan wawasan baru, dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan, pelaku usaha mikro dapat memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan SDM.

2.4 Kewirausahaan Sebagai Penggerak Ekonomi Usaha Mikro

2.4.1 Konsep Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi peluang peluang untuk mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat (Hatten, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, kemampuan untuk mengidentifikasi

peluang peluang usaha menjadi sangat penting untuk koperasi. Kapasitas pengurus koperasi untuk melihat jauh kedepan (visi) dengan memperhatikan peluang usaha dan menyadari kekuatan serta kelemahan yang dimiliki menjadi faktor penting dalam mengembangkan pengelolaan koperasi. Kebutuhan dan harapan anggota koperasi semakin variatif dan dinamis. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi peluang peluang usaha diyakini dapat membantu koperasi dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan anggota. Koperasi yang memiliki nilai kewirausahaan merupakan koperasi yang mampu melihat peluang atau memiliki ide ide dan mengidentifikasi risiko untuk memulai bisnis dengan memanfaatkan peluang atau ide ide. Berdasarkan konsep tersebut, koperasi harus memiliki perilaku kewirausahaan seperti kreatif, inovatif, proaktif, tidak takut kepada risiko, dan berorientasi kinerja.

Keterlibatan nilai nilai kewirausahaan dalam aktivitas koperasi menjadi sangat penting untuk menjadikan koperasi selalu menambah layanan layanan usaha dalam kerangka besar pemenuhan kepuasan anggota. Memasukkan nilai nilai kewirausahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi pengelola koperasi dalam mencapai tujuan organisasi koperasi. Keyakinan diri koperasi dan pengelola mendorong koperasi untuk menggunakan seluruh kemampuannya, keterampilannya, dan sumberdaya yang dimiliki dalam mencapai tujuan dan prestasi organisasi koperasi (Baron, 2004).

Sikap dan orientasi kewirausahaan organisasi sangat menentukan kinerja dan keberhasilan kegiatan dan bisnis organisasi (Dai et al., 2018).

Orientasi kewirausahaan merupakan praktik penting untuk meningkatkan aktivitas kewirausahaan organisasi bersamaan dengan pilihan manajer dalam meningkatkan tujuan organisasi, memperkuat visi, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Perilaku yang menjadi ciri orientasi kewirausahaan meliputi inovasi, pengambilan risiko, proaktif, agresivitas bersaing, dan otonomi (Rauch et al., 2009). Kemampuan inovasi merupakan kecenderungan membantu kegiatan yang dapat mengarah pada pembentukan proses, layanan, atau produk baru di suatu organisasi. Pengambilan risiko merupakan sikap organisasi yang bersedia menerima risiko terkait dengan keinginan untuk memperoleh sesuatu hasil yang signifikan. Proaktif merupakan kecenderungan organisasi untuk terlibat menghadapi tantangan saat peluncuran teknologi baru, jasa, atau produk. Hal ini terkait dengan kemampuan untuk membayangkan dan mencari peluang baru. Proaktif tersebut didefinisikan sebagai perspektif mencari peluang, berwawasan ke depan yang ditandai dengan pengenalan produk dan layanan baru untuk mengantisipasi permintaan di masa depan.

2.4.2 Pentingnya Pendampingan Kewirausahaan

Pendampingan kewirausahaan yang dilakukan oleh koperasi terhadap UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal serta memperkuat daya saing usaha kecil. Salah satu alasan pentingnya pendampingan ini adalah karena banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, serta pengetahuan manajerial. Koperasi bisa menjadi solusi dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan fleksibel

dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Melalui koperasi, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan skala produksinya.

Selain itu, koperasi juga berperan penting dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola bisnis secara lebih profesional, termasuk dalam aspek pemasaran, keuangan, serta inovasi produk. Dengan adanya pendampingan dari koperasi, para pengusaha kecil ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola usaha, sehingga bisnis mereka dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan.

Koperasi juga memiliki peran besar dalam membantu UMKM memperluas jaringan pasar. Dengan anggota yang terdiri dari berbagai pelaku usaha, koperasi memungkinkan adanya kolaborasi antar usaha yang dapat membuka peluang pasar baru. Jaringan ini tidak hanya membantu UMKM memasarkan produk mereka di tingkat lokal, tetapi juga memberi kesempatan untuk menembus pasar nasional, bahkan internasional, melalui strategi pemasaran kolektif yang dilakukan koperasi.

Pada akhirnya, pendampingan kewirausahaan oleh koperasi terhadap UMKM tidak hanya membantu para pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mendukung UMKM, koperasi

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dimana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh masyarakat luas.

2.4.3 Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial menjadi fenomena penting di beberapa tahun terakhir. Kewirausahaan sosial berhasil menarik perhatian beberapa golongan seperti akademisi, praktisi bisnis sampai masyarakat pada umumnya, maka dari itu tidak heran jika kewirausahaan sosial telah berkembang pesat di beberapa negara di dunia. Kewirausahaan sosial dipercaya mampu membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan bisa ikut terlibat dan merasakan baik secara langsung maupun tidak langsung manfaat dari kewirausahaan sosial. Salah satu manfaat dari kewirausahaan sosial adalah membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

Kewirausahaan sosial sederhananya mempunyai pengertian suatu usaha seseorang didalam menyelesaikan suatu permasalahan sosial dengan menggunakan prinsip bisnis atau kewirausahaan. Kewirausahaan sosial termasuk dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kewirausahaan sosial mempunyai beberapa kata kunci yaitu adanya misi sosial, pengamatan prinsip bisnis yang sesuai etika, pemberdayaan dan memonitori dampak pada lingkungan sosial. Dalam kewirausahaan sosial harus mempunyai prinsip bisnis yang sesuai dengan etika bisnis. Kewirausahaan social mempunyai prinsip bisnis utama yaitu

memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata.

Dalam lingkup dunia kewirausahaan yang ada di Indonesia, dalam mengelola usahanya wirausahawan perempuan memiliki peran lebih sedikit jika dibandingkan wirausahawan laki-laki. Perempuan cenderung lebih memilih bekerja dibandingkan dengan memulai sebuah usaha. Termasuk salah satunya adalah bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia yaitu disebabkan oleh kesempatan kerja yang terbatas dan adanya kesesuaian keahlian serta pendidikan pada setiap jenis pekerjaan. Bekerja pada sektor formal setidaknya dibutuhkan tingkat pendidikan yang mumpuni dan diwajibkan membayar pajak, sedangkan pada sektor informal yaitu tenaga kerja yang melakukan segala jenis pekerjaan serta tidak adanya perlindungan dari negara dan pekerjaan tersebut tidak dikenai pajak. Kekuatan fisik adalah suatu hal yang biasanya diandalkan oleh para pekerja sektor informal. Adanya ketentuan pendidikan tinggi di sektor formal dan sedikitnya lapangan pekerjaan membuat beberapa masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan rendah dan mengandalkan keahliannya lebih memilih untuk bekerja luar negeri. Hingga saat ini menjadi pekerja migran merupakan pekerjaan yang cukup diminati oleh banyak pekerja usia produktif.

Ciri-ciri Kewirausahaan Sosial:

1. **Misi Sosial Sebagai Fokus Utama:** Kewirausahaan sosial menempatkan masalah sosial atau lingkungan di pusat dari model bisnisnya. Contoh misinya bisa berupa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, atau mengurangi limbah plastik.
2. **Inovasi dalam Penyelesaian Masalah:** Seorang wirausahawan sosial menggunakan pendekatan kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah sosial yang ada. Ini bisa berarti menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang membantu mengatasi masalah tersebut secara efektif.
3. **Keberlanjutan Finansial:** Meskipun fokus utamanya adalah dampak sosial, kewirausahaan sosial juga harus berkelanjutan secara ekonomi. Artinya, usaha tersebut harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk terus menjalankan dan memperluas program-programnya tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi atau subsidi.
4. **Dampak yang Terukur:** Keberhasilan kewirausahaan sosial tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana masalah sosial atau lingkungan yang ditargetkan bisa diatasi. Ini melibatkan pengukuran dampak yang konkret, seperti jumlah orang yang terbantu, pengurangan emisi karbon, atau jumlah pendidikan yang disediakan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bidang Usaha Pengembangan Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di wilayah Blitar. Bidang ini memiliki tugas utama dalam merancang program pelatihan, pendampingan serta pemberian bantuan teknis dan finansial kepada pelaku usaha mikro, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan finansial kepada pelaku usaha mereka.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai pada tanggal 1 November 2024. Waktu praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan setiap hari senin-kamis dari jam 07.00-15.00 WIB. Sedangkan pada hari jumat dilaksanakan pada jam 07.00 WIB sampai dijam 14.00 WIB, yang berlokasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar di Jalan Imam Bonjol No.13 Sananwetan, kecamatan Sananwetan Kab. Blitar Jawa Timur.

3.2 Metode PKL

Metode Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan merupakan metode observasi partisipasi yaitu metode yang ikut berpartisipasi secara langsung dan terlibat dalam berbagai kegiatan di Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Selama PKL, mahasiswa ditempatkan pada bidang Pengembangan Usaha Mikro selama satu bulan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah membantu

dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan produksi olahan makanan atau minuman, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga, monev UM Berdasi, kemudian membantu menyeleksi dan menginput data diri peserta yang tidak lolos dalam program Bangsapri, terjun lapangan ke rumah produksi atau toko untuk mendata kelengkapan berkas dan menilai kelayakan usaha, serta mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar. Data pokok pengamatan diperoleh dari observasi, dan wawancara langsung yang dilakukan dengan pendamping Praktik Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar serta rekan naker sesuai dengan *jobdesk* yang dilakukan dan dibutuhkan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan naker untuk menggali pengalaman dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas di instansi tersebut.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 2016.) untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Pada sumber data primer ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan karakteristik tertentu terhadap subjek penelitian yang akan diteliti. Sumber data primer diperoleh langsung dari 1 naker.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari jurnal dan buku.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menulis laporan Praktik Kerja Lapangan adalah :

a) Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui pegajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara dimana hanya pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada

saat terjadinya wawancara, namun ada beberapa pertanyaan umum untuk mengejar cakupan topik yang luas.

b) Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara *participant observation*, terhadap objek yang diteliti yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan program pelatihan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengambil gambar, video, maupun tulisan untuk membuktikan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi pada saat kegiatan PKL ini berbentuk pengambilan gambar menggunakan media elektronik berupa *smartphone*, untuk mendukung penelitian.

d) Studi pustaka

Pengumpulan data berupa studi pustaka yaitu dengan mencari informasi melalui literatur atau sumber-sumber tertulis seperti jurnal penelitian terdahulu, buku, artikel dan sebagainya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

4.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar

Di bawah ini adalah profil singkat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar

Nama	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) Kabupaten Blitar
Alamat	: JL. Imam Bonjol No.13, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Blitar 66137
Telpon/Fax	: (0342) 801833/(0342) 812549
Email	: diskopum@blitarkab.go.id
Website	: diskopum.blitarkab.go.id
Bidang Tugas	: Membantu Bupati Blitar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Blitar

Sebuah organisasi yang bagus tentunya harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam pengurusannya. Visi dan misi yaitu cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif.

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan, visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Blitar, yaitu sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”.

Misi

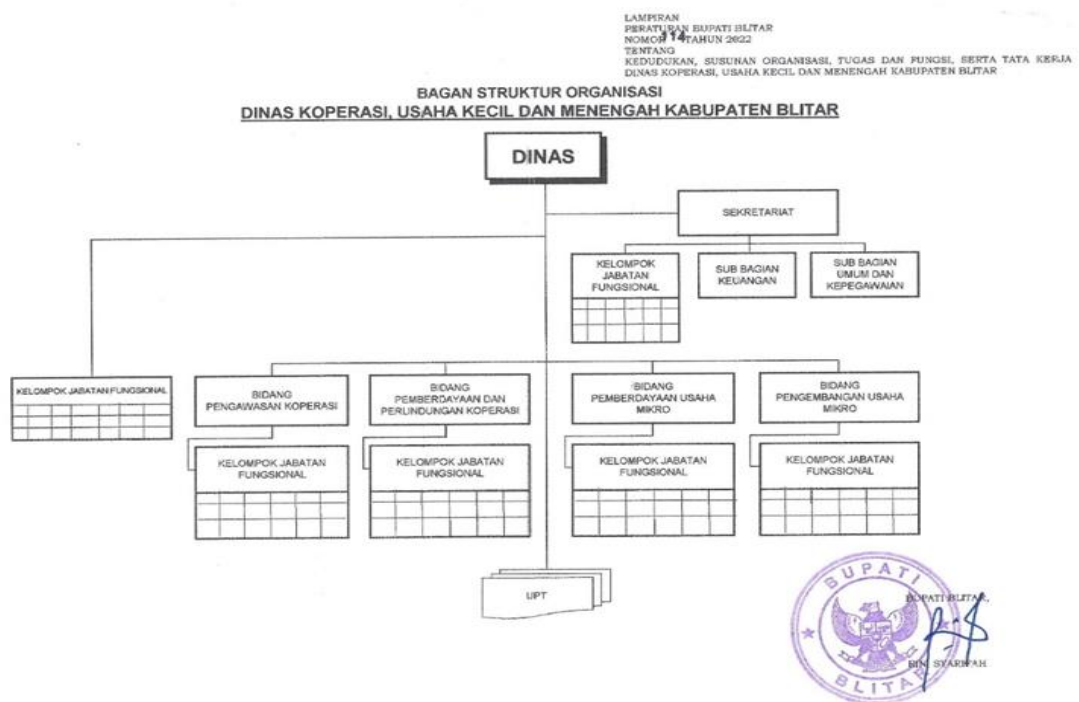
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan local budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegrasi.
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar

Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan bagaimana tugas, peran, tanggung jawab, dan wewenang dibagi,

dikelompokkan, dan dikoordinasikan di dalam sebuah organisasi. Struktur ini menunjukkan hierarki atau tingkatan dalam organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga anggota terbawah, serta menjelaskan hubungan antara individu dan departemen yang berbeda.

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar

Dari struktur organisasi diatas berikut terkait tugas dan fungsi dari tiap bagian yaitu sebagai berikut:

1) Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- c) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d) Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- e) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;

- f) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- g) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- h) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- i) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan penzinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j) Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- k) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja Dinas;
dan
- l) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

2) Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan,

menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
 - b) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan;
 - e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f) Pengelolaan asset dan barang milik negara/ daerah;
 - g) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - j) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 - k) Pengelolaan kearsipan;
 - l) Pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- dan

- m) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- e) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

5) Bidang pengawasan Koperasi

Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas merencanakan bahan kebijakan teknis kegiatan pendirian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelaksanaan penyuluhan pendirian dan pendampingan koperasi, melakukan koordinasi, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi penerbitan pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi konvensional maupun syariah,

pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan koperasi, kemandirian ketangguhan dan akuntabilitas koperasi, penghargaan dan penerapan sanksi koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis kegiatan pendirian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- b) Pelaksanaan penyuluh pendirian dan pendampingan koperasi;
- c) Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, rekomendasi penerbitan pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi;
- e) Pemberian penghargaan dan penerapan sanksi pada koperasi;
- f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

6) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi pembinaan, pengendalian dan

pemberi bimbingan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- b) Pemberdayaan peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha koperasi;
- c) Pengembangan Jaringan akses pasar dan kemitraan usaha koperasi;
- d) Pelaksanaan fasilitas akses pembiayaan;
- e) Penguatan kelembagaan koperasi;
- f) Penataan manajemen koperasi;
- g) Pelaksanaan fasilitas standarisasi produk usaha koperasi;
- h) Pembinaan dan pengendalian bidang pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- i) Pembinaan teknis operasional bidang Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- j) Pelaksanaan fasilitas pendidikan dan pelatihan standarisasi kompetensi sumber daya manusia koperasi;
- k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan database koperasi; dan
- l) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

7) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- b) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro;
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendataan potensi dan pengembangan usaha, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan, koordinasi, sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan serta fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan usaha mikro;

- e) Pelaksanan bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan usaha mikro; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

8) Bidang Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan usaha mikro dalam pengembangan produksi, pengolahan, sumber daya manusia, desain dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan dinas;
- b) Penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Perumusan program dan kegiatan bidang melalui sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d) Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk program dan kegiatan bidang sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
- f) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- g) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang berpedoman pada petunjuk dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- h) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- i) Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- j) Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Pembagian dan penyelesaian tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) Pelaksanaan penelitian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

9) UPT

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan.
- d) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang – undangan.

4.2 Pembahasan Hasil Kegiatan

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan

1. Program pelatihan MusrenBang dan Bang Sapri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia umumnya memiliki beberapa program pelatihan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM agar dapat bersaing, berinovasi, dan berkembang. Beberapa program pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Blitar meliputi:

- a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan *Musrenbang* bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perencanaan ini juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga menghasilkan pembangunan yang terarah dan terintegrasi. Di Kabupaten Blitar, kegiatan *Musrenbang* ini diselenggarakan di beberapa lokasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat dari berbagai wilayah. Berbagai kegiatan dijalankan untuk memberdayakan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama dalam bidang wirausaha kuliner. Kegiatan pertama, peserta mendapatkan penyuluhan dari para ahli yang membahas pentingnya perencanaan yang matang dalam menjalankan usaha. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar kewirausahaan dan langkah-langkah yang diperlukan agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Diskusi juga mencakup pentingnya inovasi produk dan strategi pemasaran yang efektif dalam memperkuat daya saing usaha.

Kegiatan kedua, kegiatan dilanjutkan dengan praktik membuat produk kue bolen. Proses ini didampingi oleh seorang narasumber ahli yang memberikan arahan teknis kepada para peserta, mulai dari pemilihan bahan hingga proses pengolahan yang menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah berhasil membuat kue, peserta diberikan pelatihan tentang teknik pengemasan produk yang benar. Mereka diajarkan cara mempacking kue bolen sesuai standar kesehatan dan keamanan, termasuk memperhatikan nilai estetika kemasan. Aspek kemasan ini penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki tampilan yang menarik, higienis, dan mampu menarik perhatian konsumen, sehingga bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan ketiga, peserta kembali melanjutkan kegiatan praktis dengan membuat produk kue bolu gulung. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah variasi keterampilan mereka dalam pembuatan produk kuliner. Selain praktik pembuatan kue, para peserta didorong untuk memahami pentingnya legalitas usaha dengan didata mengenai kepemilikan izin-izin resmi seperti sertifikasi halal, MERK, BPOM, NIB, izin PIRT, dan izin edar lainnya yang relevan. Pemeriksaan legalitas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peserta yang akan memulai atau mengembangkan usahanya telah memenuhi persyaratan hukum yang dibutuhkan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh kepercayaan dari konsumen.

Sebagai bentuk dukungan konkret, dinas koperasi memberikan oven kepada setiap peserta. Bantuan ini diberikan dengan harapan bahwa

peserta dapat melanjutkan praktik yang telah mereka pelajari selama pelatihan dan mengembangkan bisnis kuliner mereka secara mandiri. Dengan adanya keterampilan dan peralatan yang memadai, para peserta diharapkan dapat terus berinovasi, menciptakan produk-produk berkualitas, serta meningkatkan taraf ekonomi mereka melalui usaha kuliner yang dijalankan secara profesional dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen *Musrenbang* dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal, dan mengarahkan mereka pada kemandirian ekonomi.

b) Program "*Bang Sapri*" (Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri)

dirancang untuk meningkatkan kualitas produk, kreativitas, produktivitas, serta kemampuan manajemen dan strategi pemasaran bagi para perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga. Melalui kelas pelatihan peserta mendapatkan bimbingan dan pendampingan langsung dari para coach, mentor, dan narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha dan pengembangan bisnis. Program ini diikuti oleh perempuan kepala keluarga yang memiliki usaha mandiri atau berencana mengembangkan usaha mereka.

Kegiatan pertama, sesi penyuluhan tentang dasar-dasar kewirausahaan diberikan. Dalam penyuluhan ini, para peserta belajar mengenai prinsip-prinsip bisnis yang kokoh, strategi untuk mengelola usaha yang berkelanjutan, serta kiat-kiat meningkatkan kualitas produk agar lebih

menarik di pasar. Peserta juga diajak untuk berpikir kreatif dan memahami pentingnya inovasi dalam mengembangkan usaha.

Kegiatan kedua, fokus kegiatan beralih pada aspek motivasi, di mana peserta diberi dorongan dan inspirasi untuk mengatasi tantangan yang sering dihadapi dalam perjalanan usaha, terutama oleh perempuan yang juga memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga. Sesi ini menghadirkan motivator yang berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan wirausaha. Tujuannya adalah untuk memperkuat semangat para peserta, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka dengan ketekunan dan keuletan.

Kegiatan ketiga, peserta diajak untuk mengikuti praktik pembuatan kue pukis yang dipandu oleh mentor ahli dalam bidang kuliner. Kegiatan ini memberikan keterampilan praktis bagi para peserta untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan adonan, hingga teknik memanggang yang benar. Para peserta diajarkan proses pembuatan pukis secara detail agar dapat menghasilkan produk yang enak dan konsisten. Selain praktik langsung, mereka juga mendapatkan loyang atau cetakan pukis sebagai alat penunjang untuk digunakan dalam produksi selanjutnya. Pada akhir sesi, peserta diberikan bahan baku untuk satu resep adonan pukis sebagai tugas (PR) yang harus mereka kerjakan di rumah.

Melalui tugas ini, para peserta dapat mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari secara mandiri. Pada pertemuan berikutnya, hasil pukis buatan mereka akan dievaluasi oleh mentor untuk memberikan umpan

balik, memperbaiki teknik, dan memastikan bahwa mereka mampu menghasilkan produk berkualitas yang siap dipasarkan. Melalui rangkaian pelatihan dan bimbingan ini, diharapkan para perempuan peserta program "Bang Sapri" dapat mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif, kreatif, dan percaya diri, sehingga usaha tersebut dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi keluarga mereka.

2. Program Pendampingan Monev UM Berdasi

Program "*Monev UM Berdasi*" (Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro) bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dengan menekankan pada peningkatan potensi diri dan keterampilan para pelaku usaha, terutama di bidang kewirausahaan, strategi branding, pengelolaan keuangan, perluasan pasar, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan bimbingan, pelatihan teknis (Bimtek), dan pendampingan intensif, peserta program ini memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas usaha mereka dalam berbagai aspek, yang dinilai melalui beberapa indikator utama yang berperan penting dalam memantau perkembangan mereka.

Indikator pertama adalah legalitas usaha. Hal ini mencakup apakah para peserta telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi PIRT untuk produk pangan, label Halal, hak merek dagang, atau izin BPOM, yang semuanya penting dalam menciptakan usaha yang sah dan kredibel di mata konsumen. Pemenuhan standar legal ini bertujuan untuk menjamin keamanan produk dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, serta memperkuat posisi usaha di pasar.

Selanjutnya adalah indikator terkait rumah produksi. Dalam hal ini, dinilai apakah peserta telah memiliki ruang produksi yang layak, apakah ruang tersebut terpisah dari area rumah, serta bagaimana kondisi kepemilikan rumah atau ruang produksi (apakah dimiliki sendiri, milik orang tua, atau kontrak). Alur produksi dinilai berdasarkan efisiensi dan kualitas proses, sedangkan kebersihan tempat produksi dievaluasi dari tingkat pemeliharannya. Selain itu, keberadaan outlet juga diperhatikan untuk menilai akses produk bagi konsumen, apakah usaha tersebut memiliki tempat jual langsung atau belum.

Indikator kualitas produk juga menjadi poin evaluasi utama. Kualitas produk dinilai berdasarkan tampilan dan rasa, termasuk bahan kemasan yang digunakan untuk memberikan nilai tambah pada produk. Struktur label juga dievaluasi, dengan harapan bahwa setiap produk memiliki label yang informatif dan menarik, sehingga konsumen memahami isi dan manfaat produk dengan mudah.

Dalam aspek pemasaran, program ini mengevaluasi apakah peserta telah memiliki sarana promosi dasar seperti petunjuk arah, banner, kartu nama, papan nama, atau brosur yang efektif. Penggunaan media online juga menjadi perhatian, termasuk pemanfaatan platform seperti Facebook, Instagram, dan marketplace, yang idealnya menggunakan nama toko atau usaha agar mudah dikenali konsumen. Evaluasi ini juga mencakup jangkauan pasar usaha, yaitu apakah produk sudah dikenal di tingkat kecamatan, kabupaten, kota lain, atau bahkan sudah dipasarkan di luar negeri.

Kapabilitas produksi menjadi indikator berikutnya, yang menilai seberapa besar kapasitas produksi harian, bulanan, dan tahunan usaha peserta. Hal ini penting untuk memahami seberapa siap mereka dalam memenuhi permintaan pasar yang berpotensi meningkat. Selain itu, pembukuan keuangan dinilai untuk melihat apakah peserta sudah menggunakan sistem digital atau masih mencatat secara manual. Ini penting dalam mengukur transparansi dan ketepatan pelaporan keuangan, yang akan mendukung pertumbuhan usaha.

Aspek strategi dan kreativitas atau inovasi dalam produk juga menjadi bagian dari evaluasi. Inovasi produk dan strategi pemasaran yang kreatif menunjukkan seberapa adaptif pelaku usaha dalam menghadapi persaingan dan perubahan permintaan pasar. Peningkatan omset juga dilihat sebagai indikator keberhasilan, di mana pendapatan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dapat menunjukkan pertumbuhan usaha yang positif.

Indikator pemberdayaan tenaga kerja turut diperhatikan, dengan penilaian apakah usaha hanya mempekerjakan anggota keluarga atau sudah melibatkan tetangga atau tenaga kerja dari luar keluarga. Indikator ini mencerminkan kontribusi usaha dalam memberdayakan masyarakat sekitar, yang memiliki dampak positif pada ekonomi lokal.

Terakhir, potensi sumber daya manusia (SDM) dari pelaku usaha juga menjadi aspek penting dalam evaluasi. Hal ini meliputi kemampuan mereka dalam berkomunikasi, tingkat kerja sama, serta kreativitas yang dimiliki. Kemampuan interpersonal dan keterampilan komunikasi yang baik, ditambah dengan sikap

kooperatif dan kreatif, menunjukkan kesiapan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis secara lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Seluruh indikator ini menjadi acuan bagi pendampingan yang dilakukan dalam program *Monev UM Berdasi*, dengan harapan agar dukungan dari dinas koperasi dapat tersalurkan secara tepat dan efektif kepada para pelaku usaha mikro. Melalui berbagai jenis usaha seperti kue basah, kue kering, minuman jamu, hingga produk handmade, program ini dirancang agar para peserta mampu menciptakan produk berkualitas, meningkatkan pemasaran, dan memperkuat keberlanjutan usaha mereka, sehingga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bimbingan utama yang diajarkan dalam pendampingan kewirausahaan.

Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Blitar memiliki program pendampingan kewirausahaan seperti *Monev UM Berdasi* yang fokus pada beberapa aspek utama untuk membantu pelaku usaha di wilayah tersebut, mengembangkan bisnis mereka secara efektif. Salah satu bimbingan yang diberikan adalah tentang perencanaan bisnis yang baik. Para wirausahawan diberikan pemahaman mengenai cara membuat rencana usaha yang efektif, termasuk penyusunan visi, misi, dan strategi usaha yang sesuai dengan kondisi pasar lokal. Mereka juga belajar bagaimana melakukan analisis terhadap pasar dan mengidentifikasi kebutuhan serta preferensi konsumen setempat, sehingga bisnis yang mereka jalankan dapat lebih mudah diterima dan bertahan dalam persaingan.

Selain itu, Dinkop Kab. Blitar memberikan bimbingan dalam hal manajemen keuangan usaha. Pengelolaan keuangan dianggap sebagai salah satu

kunci keberhasilan bisnis, dan melalui bimbingan ini, pelaku usaha diajarkan mengenai pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan arus kas, serta cara menentukan harga jual yang sesuai agar memperoleh keuntungan yang optimal. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang permodalan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan lain, serta bagaimana cara mengajukan pinjaman atau kredit dengan persyaratan yang ringan.

Dinkop Blitar juga fokus pada pengembangan produk dan inovasi, dimana para wirausahawan diajak untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan produk yang memiliki daya tarik dan nilai tambah di pasaran. Mereka diberikan bimbingan mengenai peningkatan kualitas produk, penggunaan bahan baku yang baik, serta pengemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, dinkop memberikan pendampingan terkait cara-cara menjaga konsistensi kualitas produk agar kepercayaan konsumen tetap terjaga.

Pemasaran digital menjadi bimbingan penting lainnya dalam program pendampingan ini. Mengingat perkembangan teknologi, Dinkop Blitar membantu para pelaku usaha untuk menguasai dasar-dasar pemasaran digital seperti penggunaan media sosial, cara efektif berjualan di platform e-commerce, serta strategi digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Mereka diajarkan tentang penggunaan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memperkenalkan produk mereka ke khalayak yang lebih luas, termasuk teknik fotografi produk yang menarik.

Dinas juga memberikan pendampingan terkait aspek hukum dan perizinan usaha. Dalam hal ini, para pelaku usaha diberikan informasi dan panduan tentang

proses mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sertifikasi produk halal, hingga hak kekayaan intelektual. Mereka diajarkan bagaimana mengurus berbagai izin dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kredibilitas serta legalitas usaha mereka, sehingga lebih dipercaya oleh konsumen maupun calon mitra usaha.

Dalam aspek manajemen operasional, Dinkop Blitar juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mereka diajarkan mengenai manajemen stok, pengelolaan tenaga kerja, serta cara mengelola sumber daya usaha lainnya secara efektif. Bimbingan ini diberikan agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan biaya operasional dapat ditekan, sehingga usaha bisa menjadi lebih efisien dan kompetitif.

Terakhir, Dinkop Kabupaten Blitar menekankan pentingnya membangun jaringan bisnis dan kemitraan bagi para wirausahawan. Melalui pendampingan ini, mereka diberikan kesempatan untuk memperluas networking dan menemukan peluang kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti perusahaan besar, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang bisa mendukung perkembangan usaha mereka.

4. Tantangan yang sering dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program pelatihan dan pendampingan.

Dinas Koperasi dan UMKM di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, sering menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, partisipasi peserta yang kurang

optimal, keterbatasan akses teknologi, tingkat literasi yang rendah, kendala geografis, serta evaluasi dan keberlanjutan program.

Pertama, keterbatasan anggaran sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Banyak Dinas Koperasi dan UMKM hanya memiliki anggaran terbatas untuk mengadakan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan. Akibatnya, jumlah pelatihan dan materi yang diberikan kepada peserta sering kali kurang memadai, atau pelatihan hanya dapat diberikan kepada kelompok tertentu, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum bisa merasakan manfaatnya.

Selain itu, partisipasi peserta kadang tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, peserta yang diundang atau terdaftar sering kali tidak hadir atau mengikuti program secara penuh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pelatihan, waktu pelatihan yang berbenturan dengan aktivitas usaha, atau bahkan rasa pesimisme karena pelatihan yang sebelumnya mungkin belum memberikan hasil nyata bagi usaha mereka.

Keterbatasan akses teknologi juga menjadi tantangan besar, terutama ketika program pelatihan atau pendampingan memerlukan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, belum terbiasa dengan teknologi, sehingga sulit mengikuti pelatihan yang berbasis digital atau memahami materi pemasaran digital, e-commerce, dan teknologi lainnya yang dibutuhkan dalam era bisnis modern. Hal ini sering kali membuat efektivitas pelatihan digitalisasi menjadi rendah.

Rendahnya tingkat literasi juga menjadi tantangan, terutama terkait dengan literasi keuangan dan literasi bisnis. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan pembukuan, perencanaan keuangan, atau strategi pemasaran yang baik. Literasi yang rendah ini mengakibatkan materi pelatihan sulit dipahami atau diterapkan, sehingga pendampingan harus lebih intensif, yang kadang tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu dan sumber daya pendamping.

Kendala geografis sering dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, terutama di wilayah yang memiliki akses transportasi sulit atau di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan pelatihan sulit menjangkau seluruh pelaku UMKM di daerah tersebut, dan biaya operasional untuk melakukan pelatihan atau pendampingan di wilayah yang jauh juga cukup tinggi.

Tantangan lain adalah dalam hal evaluasi dan keberlanjutan program. Setelah pelatihan selesai, tidak semua peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan karena kurangnya pendampingan lanjutan atau evaluasi terhadap perkembangan usaha mereka. Tanpa adanya program tindak lanjut, banyak peserta pelatihan kembali ke pola lama atau tidak melanjutkan inovasi yang diajarkan. Ini mengakibatkan program tidak memberikan dampak jangka panjang yang optimal.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini sering menghambat keberhasilan program pelatihan dan pendampingan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Upaya mengatasi tantangan tersebut, seperti peningkatan alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi yang lebih adaptif, serta membangun sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan program,

menjadi hal yang perlu diperhatikan agar program dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

5. Metode yang diterapkan, Respons dan Tingkat Partisipasi Usaha Mikro terhadap program

Respons dan tingkat partisipasi pelaku usaha mikro terhadap program pelatihan dan pendampingan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM umumnya bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti relevansi materi, metode pelatihan, dan kebutuhan praktis peserta. Banyak pelaku usaha mikro yang menunjukkan antusiasme terhadap program ini karena melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat diterapkan langsung dalam bisnis mereka. Mereka yang sudah merasakan manfaat dari pelatihan cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dan bahkan merekomendasikan pelatihan kepada pelaku usaha lain. Namun, ada pula yang partisipasinya rendah, biasanya disebabkan oleh keterbatasan waktu karena kesibukan mengelola usaha, kurangnya informasi mengenai program, atau kurangnya akses ke lokasi pelatihan, terutama bagi yang berada di wilayah terpencil.

Metode pelatihan dan pendampingan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tingkat pengetahuan peserta. Metode yang sering digunakan meliputi sesi tatap muka langsung, di mana peserta mendapatkan penjelasan materi dari narasumber ahli di bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga pengembangan produk. Selain metode ceramah, pendampingan praktis juga

diterapkan, di mana peserta terlibat dalam kegiatan simulasi, praktik langsung, dan diskusi kelompok untuk mengasah keterampilan secara nyata. Pendampingan intensif ini memungkinkan peserta untuk menerapkan apa yang dipelajari secara langsung, sehingga pemahaman mereka lebih mendalam dan keterampilan yang diperoleh lebih mudah diaplikasikan.

Beberapa program juga mengadopsi metode pelatihan digital melalui webinar atau platform e-learning, terutama untuk materi yang berhubungan dengan digitalisasi usaha dan pemasaran online. Metode digital ini cocok bagi peserta yang sudah memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Bagi mereka yang kurang terampil dalam teknologi, metode ini bisa menjadi tantangan, tetapi dinas sering kali memberikan pendampingan teknis atau pelatihan dasar agar peserta mampu mengikuti pelatihan daring tersebut. Kombinasi antara metode tatap muka, praktik langsung, dan e-learning ini bertujuan untuk menjangkau pelaku usaha mikro dengan beragam latar belakang dan membantu mereka mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Peran dinas koperasi dan umkm dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) usaha mikro dilakukan melalui program pelatihan dan kewirausahaan. Salah satu program pelatihan yang diselenggarakan adalah *Musrenbang* dan *Bangsapri*, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha. Selain itu, Dinas koperasi juga melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM melalui program Monev UM Berdasi, yang fokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian, peran dinas koperasi sangat penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.

5.2 Saran

Terdapat saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas peran Bidang Usaha Pengembangan Mikro.

a. Saran Bagi Dinas Koperasi

Program pelatihan seperti *Musrenbang*, *Bang Sapri*, dan *Monev UM Berdasi* perlu dioptimalkan dengan menyusun materi berdasarkan segmentasi usaha, seperti kuliner, kerajinan, atau perdagangan, agar lebih relevan bagi peserta. Dinas Koperasi dan UMKM disarankan meningkatkan anggaran, menyusun jadwal fleksibel, memperkuat promosi, serta mengadopsi teknologi sederhana untuk menjangkau peserta di daerah terpencil.

Pendampingan lanjutan sangat penting untuk memastikan materi pelatihan dapat diterapkan. Kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lain juga diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas pelatihan dan mendukung pengembangan UMKM secara signifikan.

b. Saran Bagi Universitas Islam Blitar

Universitas dapat bekerja sama dengan menyelenggarakan program pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi. Program ini dapat mencakup aspek manajerial, keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha koperasi agar lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. D., Mulyana, A., Widarnandana, I. G. D., Armunanto, A., Sumiati, I., Susanti, L., ... & Dewi, I. C. (2022). *Manajemen sumber daya manusia* (Vol. 1). Tohar Media.
- Arini, E., Onsardi, O., & Indriani, R. (2023). Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(1), 20-35.
- Hakam, I. A., Fatahillah, K., Faniati, R. N., Izzah, N. N., & Putra, R. S. (2023). A Systematic Literature Review: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah (Ukm) Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains)*, 2(1), 61-72.
- Maulyan, F. F. (2019). Peran Pelatihan Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karir: Theoretical Review. *Jurnal Sains Manajemen*, 1(1), 40-50.
- Marviana, R. D., Sahputra, N., Iskandar, E., & Sumekar, A. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Kepada Para Pelaku Umkm Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 108-113.
- Rahmiyanti, D., & Sari, D. (2022). Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, dan Pembinaan PLUT-KUMKM Kota Kupang Terhadap Peningkatan UMKM. *Jurnal Al-Buhuts*, 18(1).
- Yolanda, S., Shaddiq, S., Faisal, H., & Kurnianti, I. (2023). Peran manajemen keuangan digital dalam pengelolaan keuangan pada umkm di banjarmasin. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 2(1), 23-32.
- Kalsum, E. U. (2024). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 14-20.
- Siagian, A. O., Martiwi, R., & Indra, N. (2020). Kemajuan pemasaran produk dalam memanfaatkan media sosial di era digital. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 3(3), 44.
- Setiawan, I., Ekhsan, M., & dhyan Parashakti, R. (2021). Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan yang di mediasi kepuasan kerja. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 186-195.
- Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2017). Implementasi Islamic Financial Planning Dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 103-122.

- Akbar, A., Sutiman, S., & Hermawan, H. (2023). Pendampingan Manajerial Koperasi Kesenian Tradisional Kerawitan dan Campursari Tombo Sayah. *Jurnal Pengabdian Tangerang Selatan [JURANTAS]*, 1(3), 88-93.
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119-130.
- Saragih, R. (2017). Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 26-34.
- Afandi, Hendra. 2021. Manajemen Koperasi. Yayasan Kita Menulis

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin PKL (Praktik Kerja Lapangan) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Nomor : B/489.04.04/1007/409.4.1/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Ijin PKL

Blitar, 20 September 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah

di -
BLITAR

Menunjuk surat dari Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Blitar Nomor : 019/PKL/MJ.FE/UNISBA/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Permohonan PKL, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin PKL atas nama AMELIA MUTIARA RUBINA BESERTA KELOMPOK pada lingkup Wilayah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan judul kegiatan "Praktik Kerja Lapangan" selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
2. Menjaga Ketertiban dan Kondusifitas lokasi kegiatan.
3. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Plt. Sekretaris,



MOH. CHOIRUL HUDA, S.E., M.Si.
Pembina
NIP. 197410242003121004

Tembusan :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
2. Sdr. Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Blitar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS EKONOMI
 Sekretariat/Kampus : Jl. Majapahit No. 4 Telp/ Fax (0342) 813145. Blitar – Jawa Timur

Nomor : 018/PKL/MJ.FE/UNISBA/IX/2024
 Perihal : **Permohonan PKL**

Kepada Yth:
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar
Jl. Imam Bonjol No.13, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan kami mohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada mahasiswa kami Semester VII Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar :

NO.	NAMA	NIM	NO TLP
1.	Amelia Mutiara Rubina	21006620009	083846786120
2.	Cristina Retno Larasati	21106620010	
3.	Dellinda Arta Mevia	21106620029	
4.	Retno Kasih Kurniati	21106620036	

Untuk mendapat ijin pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di :

Instansi / Perusahaan : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar
 Tanggal Pelaksanaan : 1 Oktober 2024 – 1 November 2024

Demikian permohonan ini diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 9 September 2024
 Mengetahui dan menyetujui
 Program Studi Manajemen

Bambang Septiawan., SS., MM
 NIDN. 0724098902

Lampiran 3 Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jl. Imam Bonjol 13 Telp (0342) 801833
 Email : diskopum.blitarkab.go.id

FORM PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
(PEMBIMBING LAPANGAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : H.Nur Chamid, S.Sos
 NIP : 197110262003121005
 JABATAN : Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda
 INSTANSI : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar.
 ALAMAT : Jln. Imam Bonjol No.13 Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur

Memberikan penilaian PKL dengan sebenar-benarnya kepada:

NAMA : Cristina Retno Larasati
 NIM : 21106620010
 PROGRAM STUDI : Manajemen
 ALAMAT : Jln. Sukun No 9D Rt 02 Rw 11 Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur

Dengan kriteria dan angka sebagai berikut:

NO	KRITERIA	NILAI (ANGKA)
1	Kepribadian (<i>nilai maks 25</i>)	25
2	Interaksi sosial (<i>nilai maks 25</i>)	25
3	Keterampilan dan Keahlian (<i>nilai maks 25</i>)	25
4	Keilmuan (<i>nilai maks 25</i>)	23
TOTAL NILAI (<i>nilai maks 100</i>)		98

Blitar, 01 Oktober 2024

Pembimbing Lapangan,




H. Nur Chamid, S.Sos
 NIP. 197110262003121005

Lampiran 4 Sertifikat Praktik Kerja Lapangan di Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Blitar



Lampiran 5 Lembar Konsultasi Bimbingan PKL



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
 Sekretariat/Kampus : Jl. Majapahit No. 4 Telp/ Fax (0342) 813145
 Blitar – Jawa Timur

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PKL

Nama Mahasiswa : CRISTINA RETNO LARASATI
 N I M : 21106620010
 Fakultas : EKONOMI
 Program Studi : MANAJEMEN
 Program Pendidikan : S1 Manajemen
 Judul PKL : "Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Micro Melalui Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan"

Konsultasi : (MINIMAL 5x)

NO.	TANGGAL	PARAF PEMBIMBING	MATERI KONSULTASI
1	07 - Oktober - 2024		Konsultasi judul
2	21 - Oktober - 2024		Bimbingan bab I
3	22 - Oktober - 2024		Bimbingan bab II
4	4 - November - 2024		Bimbingan bab III
5	5 - November - 2024		Bimbingan bab IV
6	11 - November - 2024		Bimbingan bab V
7	13 - November - 2024		Bimbingan bab VI dan lampiran
8			
9			
10			

Tgl Selesai PKL : 01 November 2024

Keterangan : Bimbingan Telah Selesai

Dosen Pembimbing PKL

NURUL FARIDA, SE.MM
 NIDN.0703127061



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
 Sekretariat / Kampus : Jl. Mojopahit 4A Telp. 0342-813145 Blitar - Jawa Timur

LEMBAR REVISI

SIDANG UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Nama : CRISTINA RETNO LARASATI
 NIM : 21106620010
 Program Studi : MANAJEMEN
 Fakultas : EKONOMI
 Judul PKL : PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM
 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
 USAHA MIKRO MELALUI PELATIHAN DAN
 PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

Naskah yang harus direvisi :

1. Peran dan Peran Koperasi
2.
3.
4.
5.

Blitar, 23 Desember 2024

Persetujuan Revisi / Perbaikan

Penguji I

(.....)

(.....)



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
 Sekretariat / Kampus : Jl. Mojopahit 4A Telp. 0342-813145 Blitar - Jawa Timur

LEMBAR REVISI

SIDANG UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Nama : CRISTINA RETNO LARASATI
 NIM : 21106620010
 Program Studi : MANAJEMEN
 Fakultas : EKONOMI
 Judul PKL : PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM
 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
 USAHA MIKRO MELALUI PELATIHAN DAN
 PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN

Naskah yang harus direvisi :

1. cek penulisan daftar pustaka
 2. kutipan di bagian Trijawan pustaka harus tercantum di daftar pustaka
 3.
 4.
 5.
- 23/21
12

Blitar, 23 Desember, 2024

Persetujuan Revisi / Perbaikan

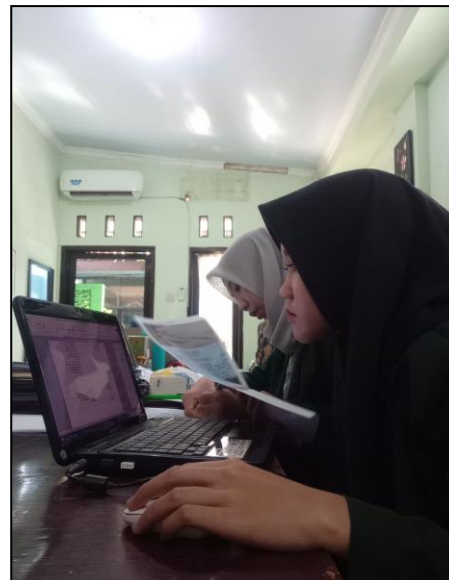
Penguji II

Lampiran 6 Dokumentasi

a. Menata ulang data ceklist seleksi administrasi UM Berdasi 2024 dan Menginput peserta Bang Sapri yang memiliki usaha dan perijinan (Halal, Merk, PIRT, INB, dan izin edar lainnya).



b. Menjadi admin pada Program Bang Sapri



c. Rapat monitoring pelaksanaan PL- KUMKM Tingkat Kabupaten Blitar



d. Kegiatan Pendampingan Monev UM Berdasi pada produk makanan dan minuman.





e. Menyeleksi peserta yang tidak lolos kegiatan Bang Sapri dan menata ulang data ceklist seleksi administrasi UM Berdasi.



f. Kegiatan Pelatihan Program *MusrenBang* di wlingi pembuatan kue Bergizi (Bolen)



g. Kegiatan pelatihan Program Bang Sapri







h. Senam bersama di setiap hari Jumat



i. Pelaksanaan Apel rutin di setiap pagi





j. Penutupan PKL dengan foto bersama ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Blitar

